

- Mahmud mulyadi, 2006, *Revitalisasi atas Filosofis Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana*, Medan: Fakultas Hukum Sumatera Utara.
- Marc Ancel, 1965. *Social Defence, Modern Approach to the Criminal Problem*, London: Roatledge & Paul Keagen.
- Martiman Prodjomidjojo, 1995. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Jakarta: Pradnya Pramita.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia.
- M. Yahya Harahap, 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Nur Basuki Winanmo, 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- P.A.F.Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Ke-3*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon, Tanpa Tahun. *Makalah: Tentang Wewenang*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Satjipto Rahardjo, 1980. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Grafika.
- Sherly Adam, 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana*, Makassar: Program Pascasarja Universitas Hasanuddin.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soufnir Chibro, 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syukri Akub, Baharuddin Badaru, 2013. *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Tongat, 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.

Jurnal :

Sodikin, 2017. *Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang*, Jurnal Rechtsvinding Vol 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.